

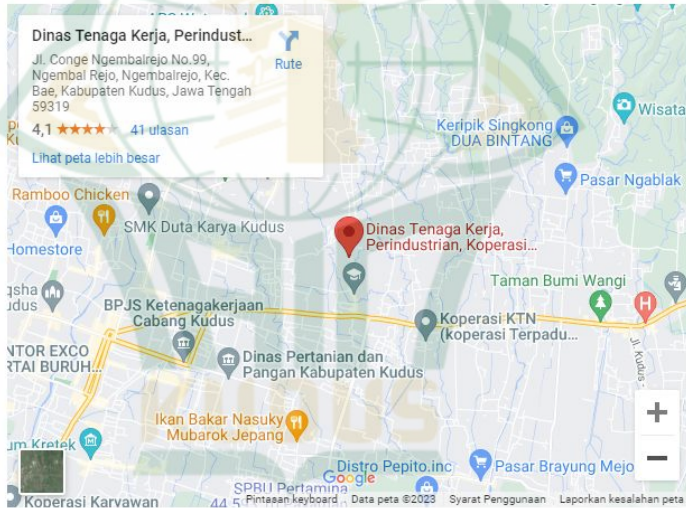
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus yang beralamatkan di Jalan Conge Ngembalrejo No. 99 Kudus, Telp. (0291) 4251970. Batas – batas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Batas utara :
- b. Batas selatan : Institut Agama Islam Negeri Kudus
- c. Batas barat : Kali Dudan
- d. Batas timur :



Gambar 4.1
Peta Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193). Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UKM Kabupaten Kudus adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UKM Kabupaten Kudus dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki visi, misi dan tugas pokok. Visi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yaitu “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera “. Adapun misi yang mendukung tercapainya visi menjadi dasar pelaksanaan program kepala daerah melalui tugas pokok dan fungsi urusan tenaga kerja, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan transmigrasi yaitu misi ke 4 (empat) “Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing “.

Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UKM Kabupaten Kudus dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Pengendalian dan pelaporan di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan

- industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
- h. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Pelaksana tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

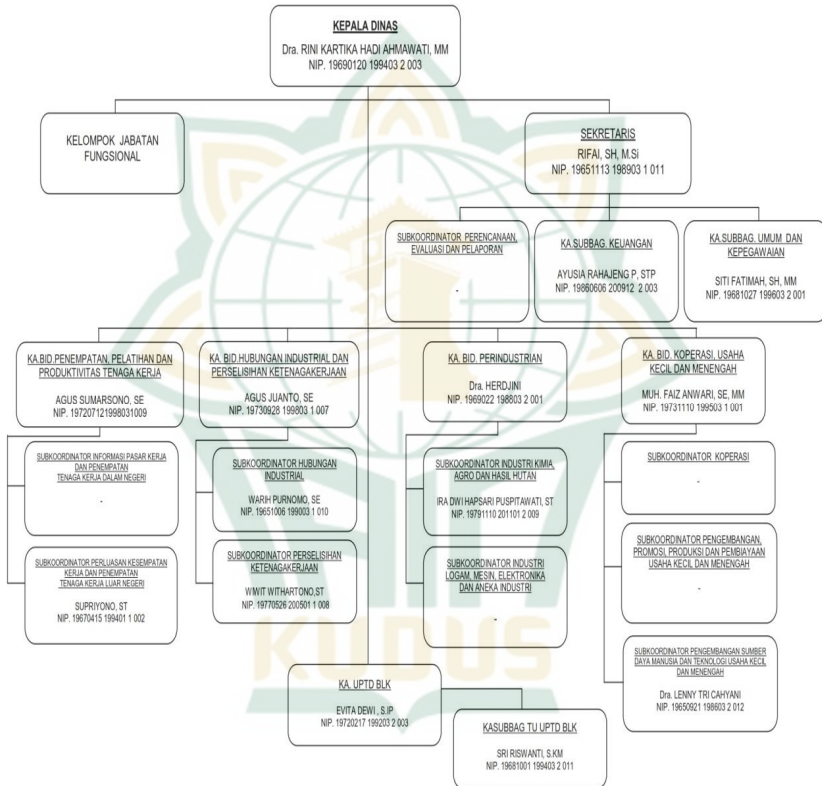
Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari atas Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1) Sub Koordinator Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 - 2) Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1) Sub koordinator Hubungan Industrial;
 - 2) Sub Koordinator Perselisihan
- e. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1) Sub Koordinator Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - 2) Sub Koordinator Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka
- f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1) Sub Koordinator Koperasi;

- 2) Sub Koordinator Pengembangan, Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- 3) Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah.

2. UPTD Balai Latihan Kerja

Adapun bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 4.2
Struktur Organisasi

Motto pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus adalah “Kami Siap Melayani dengan CERDAS ; Cepat, Efektif dan Efisien, Ramah, Dedikatif, Akuntabel, Santun.”

B. Deskripsi Data Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggali kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Kudus. Pertanyaan penelitian yang digunakan peneliti akan menggali kebijakan pemerintah dalam mengembangkan UMKM dari sisi pemerintah dan pelaku UMKM. Hasil penelitian dari jawaban informan 1 dan informan 2 selaku informan dari pemerintahan akan dipaparkan sebagai berikut:

Kebijakan pemerintah dibuat untuk memperbaiki situasi saat ini, mengatasi masalah yang ada, serta memajukan pembangunan dan kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pertanyaan peneliti yang pertama adalah “Apa tujuan dari kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman?”

Informan 1 menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri di pasar global, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusi UMKM dalam sektor makanan dan minuman terhadap PDB.

Informan 2 menyatakan bahwa kebijakan pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan akses dan penggunaan teknologi serta perbaikan infrastruktur untuk mendukung UMKM dalam sektor makanan dan minuman.

Modal usaha merupakan salah satu hal terpenting yang digunakan pelaku UMKM dalam menjalankan usaha makanan dan minuman. Modal usaha digunakan untuk meningkatkan penjualan sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Pertanyaan kedua adalah “Bagaimana cara pemerintah meningkatkan aksesibilitas terhadap modal usaha bagi UMKM sektor makanan dan minuman?”

Informan 1 menyatakan bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap modal usaha bagi UMKM sektor makanan dan minuman, kami biasa melakukan beberapa hal, antara lain menyediakan lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga yang terjangkau dan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh pelaku UMKM. Memberikan program bantuan modal usaha yang bersifat non-refundable (tidak perlu dikembalikan) baik dari APBN atau APBD maupun bantuan dari perusahaan besar dalam bentuk CSR. Meningkatkan kerja sama

antara pemerintah dengan lembaga keuangan, perusahaan, maupun investor untuk menyalurkan modal usaha bagi UMKM sektor makanan dan minuman. Memberikan program pelatihan dan pendampingan untuk membantu para pelaku usaha UMKM sektor makanan dan minuman dalam pengajuan pinjaman modal usaha.

Informan 2 menyatakan bahwa kalau dari bidang kami ada beberapa program yang dilakukan mba biasanya kaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha UMKM sektor makanan dan minuman sehingga mereka mampu mengakses modal usaha dari sumber-sumber lain, misalnya dari lembaga keuangan mikro atau lembaga sektoral. Terus juga memberikan fasilitas dan memberikan akses pelaku usaha UMKM sektor makanan dan minuman pada program dukungan modal usaha nasional maupun internasional seperti Kartu Prakerja dan seleksi calon eksportir.

Keberhasilan UMKM sangat dipengaruhi oleh peran dan keberlangsungan program yang diinisiasi oleh pemerintah. Keberhasilan UMKM di Indonesia dapat berjalan atas program yang dibentuk pemerintah terutama pada sektor makanan dan minuman. Pertanyaan ketiga adalah “Apa saja program yang diterapkan pemerintah untuk membantu pengembangan UMKM di sektor makanan dan minuman?”

Informan 1 menyatakan bahwa beberapa program yang diterapkan pemerintah untuk membantu pengembangan UMKM di sektor makanan dan minuman antara lain BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), program bantuan modal usaha yang bersifat non-refundable (tidak perlu dikembalikan) untuk pelaku usaha mikro yang menjadi korban pandemi Covid-19. Program ini membantu pengembangan modal usaha UMKM sektor makanan dan minuman. Terus program UMi (Usaha Mikro Indonesia), program pengembangan UMKM yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha mikro. Adalagi program OK OCE, salah satu program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, dimana program ini menyediakan pelatihan dan bimbingan dalam mengelola usaha mikro sektor makanan dan minuman.

Informan 2 menyatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus sudah menyiapkan program untuk UMKM mbak sekarang. Program-program dinas yang sudah ditetapkan secara nasional itu tujuannya untuk memperkuat peran UMKM di sektor makanan dan

minuman dalam perekonomian nasional dan menopang pengembangan ekonomi lokal. Sehingga, membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Warung Pintar. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pinjam-meminjam modal usaha untuk pelaku usaha sektor mikro, kecil, dan menengah. Program ini disediakan oleh berbagai bank yang bekerjasama dengan Pemerintah dalam rangka pengembangan UMKM. Program Warung Pintar adalah program yang dikembangkan oleh perusahaan swasta untuk membantu pengelolaan usaha mikro sektor makanan dan minuman. Program ini dengan membekali warung dengan teknologi dan sistem manajemen usaha yang mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing usaha tersebut.

Konsumen saat ini sangat jeli dengan kualitas dan keamanan produk makanan dan minuman yang di konsumsi. Hal ini menjadi konsen tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga kualitas makanan baik bahan makanan maupun olahan makanan dan minuman yang sudah siap dikonsumsi. Pertanyaan selanjutnya adalah “Bagaimana pemerintah memastikan kualitas dan keamanan produk UMKM sektor makanan dan minuman yang diproduksi oleh pelaku usaha kecil?”

Informan 1 menyatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dalam memastikan kualitas dan keamanan produk UMKM sektor makanan dan minuman yang diproduksi oleh pelaku usaha kecil, kami ini dari dinas umkm sudah punya standar kualitas keamanan produk. Pemerintah membuat peraturan untuk standar kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil UMKM. Hal ini memastikan bahwa produk yang diproduksi oleh UMKM sektor makanan dan minuman memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan yang telah ditetapkan. Menyediakan pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil UMKM. Pemerintah memberikan pelatihan dan pembinaan yang berkaitan dengan cara-cara produksi makanan dan minuman yang aman, dan memberikan bimbingan dalam memahami peraturan dan persyaratan yang berlaku. Selain itu di tiap kota dan kabupaten biasanya Pemerintahnya sudah menetapkan lembaga pemeriksa independen yang bertanggung jawab dalam melakukan pengujian terhadap produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh

pelaku usaha kecil UMKM dan memastikan produk tersebut aman dikonsumsi.

Informan 2 menyatakan bahwa Pemerintah sudah menyediakan pihak-pihak otoritas yang bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi dan pengawasan secara berkala terhadap pelaku usaha kecil UMKM. Pemerintah memberikan sertifikat halal bagi pelaku usaha kecil UMKM yang memproduksi makanan dan minuman halal. Hal ini memastikan bahwa produk tersebut aman bagi konsumen muslim. Pemerintah dapat memastikan kualitas dan keamanan produk UMKM sektor makanan dan minuman, sehingga konsumen dapat membeli dan mengonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar bagi produk UMKM sektor makanan dan minuman.

Pelatihan dan pengembangan keterampilan usaha untuk pelaku UMKM merupakan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha, Pelatihan tidak hanya dalam meracik dan mengolah makanan dan minuman untuk siap dikonsumsi tetapi juga sampai dengan promosi produk ke pasaran juga sangat dibutuhkan. Pertanyaan selanjutnya adalah “Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan dukungan dan pelatihan untuk pengembangan keterampilan usaha untuk UMKM sektor makanan dan minuman?”

Informan 1 menyatakan bahwa saat ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan dan pelatihan untuk pengembangan keterampilan usaha bagi UMKM sektor makanan dan minuman. Pemerintah mengadakan pelatihan dan workshop yang khusus ditujukan bagi pengusaha UMKM sektor makanan dan minuman. Pelatihan dan workshop ini mencakup berbagai topik seperti cara mengelola keuangan usaha, manajemen produksi, pemilihan bahan baku yang berkualitas, dan lain sebagainya. Pemerintah memberikan bimbingan dan konsultasi secara langsung kepada para pengusaha UMKM dalam hal pengembangan keterampilan usaha. Bimbingan dan konsultasi ini meliputi aspek-aspek seperti pemasaran, regulasi dan perundangan, pengembangan produk, manajemen keuangan, dan sebagainya.

Informan 2 menyatakan bahwa dukungan dan pelatihan dari pemerintah sangat penting bagi pengembangan keterampilan usaha UMKM sektor makanan dan minuman. Dengan dukungan tersebut, para pengusaha dapat lebih berhasil dalam mengembangkan bisnis dan meningkatkan daya saing produk

sehingga dapat membantu terciptanya lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah menyediakan akses ke informasi dan pendanaan yang relevan bagi pengusaha UMKM sektor makanan dan minuman. Hal ini akan membantu pengusaha dalam meneliti pasar dan memperluas jangkauan produk, serta membantu dalam pembiayaan dan pengembangan bisnis. Pemerintah membantu proses sertifikasi dan standarisasi produk UMKM sektor makanan dan minuman guna memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam proses pengembangan pasar produk.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak sangat kuat pada ekonomi nasional. Dampak tersebut juga sangat dirasakan oleh masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia terkena dampak PHK yang berujung harus mencari atau bahkan membuka lapangan pekerjaan di rumah. Hal ini menjadikan peningkatan jumlah UMKM di masa COVID-19. Pemerintah berusaha untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi pada sektor UMKM makanan dan minuman. Pertanyaan selanjutnya adalah “Apa perbedaan antara kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19?”

Informan 1 menyatakan bahwa sebelum pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman lebih berfokus pada meningkatkan akses terhadap sumber daya, dukungan teknis, dan permodalan. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain memberikan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan kepada pengusaha UMKM sektor makanan dan minuman. Pemerintah juga mendorong pemakaian teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas UMKM serta memperluas akses pasar melalui kerjasama lintas sektor. Namun, akibat pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman mengalami perubahan. Pemerintah harus beradaptasi dengan kondisi pandemi yang berdampak pada perekonomian dan perubahan perilaku konsumen.

Informan 2 menyatakan bahwa dalam makna keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman setelah pandemi COVID-19 lebih menekankan pada penggunaan teknologi informasi, perlindungan sosial, dan kebijakan kesehatan dan keselamatan untuk tetap menjaga keberlangsungan bisnis UMKM dan meningkatkan daya

saing melawan persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain. Pemerintah membuka akses terhadap dukungan dan sumber daya tambahan bagi pengusaha UMKM sektor makanan dan minuman yang terdampak pandemi, seperti bantuan sosial, skema pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), dan relaksasi pajak. Pemerintah mendorong digitalisasi dalam bisnis UMKM sektor makanan dan minuman, seperti memperkuat penggunaan e-commerce, aplikasi pemesanan makanan online, dan platform pemasaran digital. Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap keamanan dan kualitas produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil, khususnya dalam memastikan kepatuhan pada protokol kebersihan dan sanitasi yang telah ditetapkan. Pemerintah mengembangkan model bisnis baru, seperti bisnis warung makan dan restoran yang dilengkapi dengan protokol kebersihan dan sanitasi yang ketat, menjual makanan yang tahan lama secara online, dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku local.

Jaringan pasar merupakan benang merah untuk mengenalkan produk local. Pertanyaan selanjutnya adalah “Bagaimana pemerintah memfasilitasi dan memperluas pasar bagi UMKM sektor makanan dan minuman untuk meningkatkan daya saing mereka?”

Informan 1 menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan memperluas pasar bagi UMKM sektor makanan dan minuman guna meningkatkan daya saing mereka. Semua upaya pemerintah tersebut bertujuan meningkatkan daya saing produk UMKM sektor makanan dan minuman melalui pengembangan bisnis, perluasan pasar, pengembangan produk, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Informan 2 menyatakan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan seperti meningkatkan kerjasama antar sektor. Pemerintah mengembangkan kerjasama antar sektor dengan pihak lain seperti industri, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk memperkuat hubungan antar pelaku dan meningkatkan akses pasar. Pemerintah mengembangkan program pemasaran khusus untuk produk UMKM sektor makanan dan minuman guna memperluas pasar produk. Program ini mencakup pengembangan produk baru, perluasan pasar, pengiklanan dan promosi, serta pengembangan ekspor. Pemerintah memberikan fasilitas bimbingan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas produk UMKM sektor makanan dan minuman seperti sertifikasi

halal, sertifikasi pangan, dan sertifikasi standar mutu ISO. Pemerintah berupaya mengembangkan kemitraan usaha antara UMKM sektor makanan dan minuman dengan perusahaan besar dalam hal distribusi pasar dan pengembangan produk. Pemerintah memberikan akses ke permodalan melalui berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pinjaman rendah bunga yang diperuntukan bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah membantu pelaku usaha kecil dalam hal membangun platform e-commerce khusus untuk penjualan produk makanan dan minuman.

Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan inovasi dan teknologi yang digunakan oleh UMKM sektor makanan dan minuman. Informan 1 menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan inovasi dan teknologi yang digunakan oleh UMKM sektor makanan dan minuman. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah dalam memberikan pendidikan, pembiayaan, fasilitas akses dan dukungan teknologi dapat memfasilitasi UMKM sektor makanan dan minuman untuk mengadopsi teknologi, meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka, serta meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan permintaan pasar.

Informan 2 menyatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sejauh ini untuk pengembangan inovasi UMKM terutama sector makanan minuman itu seperti memberikan bimbingan dan pelatihan teknologi. Pemerintah memberikan pelatihan tentang teknologi informasi, aplikasi digital, e-commerce, dan teknologi pengolah makanan dan minuman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Mendorong kolaborasi usaha dan inovasi. Pemerintah mendorong kolaborasi antara UMKM sektor makanan dan minuman dengan pihak lain seperti pembuat kebijakan, institusi pendidikan, dan perusahaan rintisan dalam rangka meningkatkan inovasi dan penggunaan teknologi. Memberikan akses pembiayaan. Pemerintah memfasilitasi akses pembiayaan dengan memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah dan program bantuan teknologi untuk membantu UMKM menjalankan bisnis mereka dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Meningkatkan akses ke informasi dan sumber daya. Pemerintah membuka akses ke berbagai sumber daya seperti pusat informasi teknologi, pusat data, dan pusat inovasi serta menawarkan kemudahan bagi UMKM untuk menjadi anggota komunitas teknologi dan bergabung dalam kegiatan inovasi. Meningkatkan akses dan keamanan dunia maya.

Pemerintah melindungi UMKM dari cyber threats dan informasi yang tidak sah dengan memperkuat kesadaran keamanan elektronik dan memberikan pelatihan tentang praktek keamanan digital serta pembinaan terkait cara mengakses dan berkomunikasi dengan supplier, pelanggan dan pihak lain terkait melalui platform elektronik

Kelangkaan bahan baku, perizinan usaha dan regulasi pemerintah merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha. Hal ini sangat menjadi momok untuk pelaku usaha dalam memulai usaha khususnya di sektor makanan dan minuman. Pertanyaan selanjutnya adalah “Bagaimana pemerintah mengatasi masalah dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman, seperti akses terhadap bahan baku, perizinan, dan regulasi pemerintah?”

Informan 1 menyatakan bahwa masalah dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman seperti akses terhadap bahan baku, perizinan, dan regulasi pemerintah juga telah diperhatikan dan diatasi oleh pemerintah Indonesia dengan beberapa cara, yaitu menjalin kerja sama dengan para petani dan produsen lokal. Pemerintah mencoba untuk menjalin kerja sama antara UMKM sektor makanan dan minuman dengan petani dan produsen lokal agar akses terhadap bahan baku lebih mudah dan dapat diandalkan. Selain itu, kerja sama ini juga memberikan dampak positif untuk meningkatkan perekonomian daerah. Memperbaiki prosedur perizinan. Pemerintah telah melakukan pemangkasan regulasi dan pemangkasan waktu dalam proses perizinan agar UMKM sektor makanan dan minuman dapat lebih mudah mengurus perizinan bagi bisnisnya. Pemerintah juga memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha dan penerbitan izin melalui berbagai program pembiayaan dan pelayanan.

Informan 2 menyatakan bahwa pemerintah sangat berperan dalam membantu UMKM sektor makanan dan minuman untuk mengatasi masalah yang ada, agar bisnis dapat berkembang dan meningkatkan daya saing di pasar global. Memberikan bimbingan dan pelatihan terkait peraturan dan standar. Pemerintah memberikan bimbingan dan pelatihan terkait peraturan dan standar dalam industri makanan dan minuman agar UMKM sektor makanan dan minuman dapat memenuhi persyaratan dan memperoleh sertifikasi untuk meningkatkan daya saing. Meningkatkan survei dan informasi pasar. Pemerintah melakukan

survei dan informasi pasar untuk memberikan informasi dan strategi yang tepat agar UMKM dapat memasarkan produknya secara efektif dan efisien.

UMKM sangat berkembang saat ini. Munculnya banyak pelaku UMKM menjadikan acuan pemerintah untuk terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha UMKM. Pertanyaan selanjutnya adalah “Apa harapan pemerintah terhadap perkembangan UMKM sektor makanan dan minuman di masa depan dan bagaimana hal tersebut dapat dicapai?”

Informan 1 menyatakan bahwa pemerintah berharap agar UMKM sektor makanan dan minuman dapat terus berkembang dan menjadi lebih kompetitif di pasar global. Hal ini dapat dicapai dengan cara memberikan dukungan, pelatihan, teknologi, dan sumber daya yang memadai kepada para pelaku usaha kecil. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kolaborasi antara UMKM, institusi pendidikan, dan perusahaan rintisan dalam rangka meningkatkan inovasi dan penggunaan teknologi.

Informan 2 menyatakan bahwa pemerintah berharap agar UMKM sektor makanan dan minuman dapat memanfaatkan teknologi digital dan e-commerce dalam membuka akses pasar, mempromosikan produk, dan mengoperasikan bisnis. Selain itu, pemerintah berharap bahwa dengan adanya kolaborasi, akses pembiayaan, dan pembinaan yang memadai, UMKM sektor makanan dan minuman akan dapat meningkatkan kualitas produk sehingga dapat mendapatkan permintaan pasar yang lebih besar baik di dalam maupun luar negeri.

Pelaku usaha UMKM saat ini meningkat jumlahnya. Sektor makanan dan minuman sangat diminati dikarenakan mudah dalam memulai. Modal usaha menjadi factor utama dalam memulai usaha UMKM. Pertanyaan untuk pelaku UMKM adalah “Bagaimana menurut Anda sudut pandang modal usaha bagi pelaku umkm sektor makanan dan minuman?”

Informan 3 menyatakan bahwa modal usaha itu paling penting. Sehingga kebijakan pemerintah untuk mempermudah kami pelaku usaha memperoleh modal usaha itu yang dibutuhkan. Informan 4 menyatakan juga bahwa modal usaha merupakan salah satu hal penting untuk memulai usaha..

Pelaku usaha UMKM merupakan pelaku yang sudah mendaftarkan usahanya dan mendapatkan legalitas usaha. Pelaku UMKM yang terdaftar dapat menggunakan program yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan usahanya.

Pertanyaan selanjutnya adalah “Apakah sudah pernah mengikuti pelatihan yang disiapkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus?”

Informan 3 menyatakan bahwa sudah pernah mengikuti pelatihan yang disiapkan oleh dinas. Pelatihan yang disiapkan oleh dinas dapat membantu menambah relasi jaringan. Informasi kegiatan pasar murah atau bazaar dapat diakses juga dengan mudah oleh pelaku usaha UMKM. Informan 4 menyatakan bahwa sudah pernah 3 kali ikut pelatihan dari dinas. Kami dihubungi biasanya untuk ikut.

Pemerintah saat ini sedang berusaha meningkatkan kualitas jual beli pelaku UMKM melalui digitalisasi. Pertanyaan selanjutnya adalah “Apakah sudah menjual produk dengan cara digital?”

Informan 3 menyatakan bahwa sudah melakukan jual beli secara online sejak 2019. Informan menyatakan bahwa sudah memanfaatkan instagram, facebook, shoppee, tokopedia dan sekarang mulai ada tiktokshop. Hal ini merupakan jaringan promosi yang sangat menguntungkan dan sangat mudah digunakan dalam berjualan. Informan 4 menyatakan bahwa sudah memakai platform digital untuk mempromosikan jualannya. Hal ini dilakukan karena lebih mudah mendapat pelanggan.

Bantuan modal saat ini sudah banyak disiapkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha UMKM sektor makanan dan minuman. Hal ini sangat dinilai efisiensi karena pemerintah memberikan kemudahan dalam proses permohonan atau pengajuan modal usaha. Pertanyaan selanjutnya adalah “Apakah mendapatkan bantuan modal dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya?”

Informan 3 menyatakan bahwa sudah mengajukan KUR mbak. Menguntungkan. Informan 4 menyatakan bahwa sudah mengajukan KUR untuk modal usaha kulinernya. Hal ini dirasakan sangat membantu. Situasi covid kemarin itu jualan juga sepi sekarang sudah mulai lancer laris. Apalagi banyak varian juga yang saya jual. Saya ikuti maunya pelanggan.

Pemerintah Kota Kudus dalam memberikan kebijakan terhadap UMKM sektor makanan dan minuman dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah sudah melakukan upaya dan dukungan secara syariah dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman. Hal ini menjawab pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana kebijakan pemerintah yang sesuai unsur ekonomi

syariah di dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman?”

Informan 1 menyatakan bahwa pemerintah khususnya dinas UMKM akan memastikan kehalalan produk yang akan dijual oleh UMKM sektor makanan dan minuman tersebut. Hal ini difokuskan pada pengembangan dan memberikan memfasilitasi program sertifikasi halal untuk produk UMKM sektor makanan dan minuman.

Informan 2 menyatakan bahwa sertifikasi halal diberikan pemerintah untuk membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk halal dari produk UMKM. Pemerintah juga memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM mengenai persyaratan dan prosedur sertifikasi halal”

Informan 3 menyatakan bahwa pelaku UMKM diberikan fasilitas dalam proses pengurusan sertifikasi halal produknya. Dengan sertifikat halal pelaku UMKM dengan mudah dapat mempromosikan produk yang dijual untuk meyakinkan pembeli sektor makanan dan minuman.

C. Analisis Data Penelitian

Sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor UMKM yang paling banyak berkembang dan menjanjikan di Indonesia. UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman banyak mengembangkan kreasi produk baru yang unik dan menarik, seperti produk dengan varian rasa yang beragam dan produk makanan yang kaya akan nutrisi dengan menjaga keaslian lokal. Perkembangan UMKM makanan dan minuman di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang baik dan positif. Integrasi antara teknologi, inovasi, dan dukungan pemerintah menjadi potensi besar bagi UMKM makanan dan minuman dalam memajukan bisnisnya. Sehingga peluang besar bagi usaha ini terus meningkat dan memberikan manfaat kepada pelaku UMKM dan pesatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemasaran di platform digital: Perkembangan teknologi dan internet telah membuka peluang besar bagi UMKM makanan dan minuman untuk memperluas pasarnya melalui platform digital seperti aplikasi pesan makanan online. Dengan adanya platform ini, UMKM bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah dengan lebih mudah.

Pengetahuan tentang cara produksi yang baik: Perhatian masyarakat terhadap kesehatan dan nutrisi yang lebih baik

mendorong UMKM makanan dan minuman untuk lebih fokus pada teknologi dan proses produksi yang lebih baik. dengan cara ini produksi bisa lebih efisien, aman, dan sehat. UMKM makanan dan minuman bisa sukses jika mereka melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik itu dengan barang, modal usaha, atau peningkatan kualitas produk.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif diantaranya program e-commerce, pelatihan UMKM dan pembiayaan teknologi yang membantu mendukung kemajuan UMKM makanan dan minuman. Ini mencakup beberapa skema bantuan, misalnya pinjaman, asuransi, dan pelatihan untuk membantu UMKM makanan dan minuman tumbuh dan mendapatkan peluang yang lebih besar di pasar. Pemerintah daerah memiliki berbagai kebijakan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi angka pengangguran.

Pemerintah daerah memberikan berbagai macam program untuk memfasilitasi UMKM dalam memperoleh pinjaman dan modal usaha, misalnya dengan memberikan bantuan kredit usaha rakyat (KUR), pengembangan koperasi simpan pinjam, dan memberikan pelatihan pengelolaan keuangan agar UMKM bisa mengelola modal usaha dengan baik. Pemberian akses modal dari pemerintah bagi pelaku UMKM sangat penting untuk memperluas peluang usaha dan meningkatkan produktivitas dalam bentuk investasi untuk mengembangkan produk dan meningkatkan kualitas produk. Dalam menjalankan akses modal bagi pelaku UMKM, pemerintah mengharapkan agar pelaku UMKM dapat mengoperasikan bisnis dengan efektif dan lebih mandiri sehingga mereka dapat semakin berkembang serta berkontribusi dalam dunia bisnis Indonesia.

Pemerintah daerah memfasilitasi UMKM dalam hal peningkatan kualitas dan produktivitas dengan memberikan pelatihan, pemberian izin usaha, dan pembiayaan teknologi. Misalnya memberikan pelatihan teknik produksi, pengenalan teknologi digital, dan fasilitasi program riset dan pengembangan agar dapat mengembangkan produk-produk yang berdaya saing. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas bisnisnya.

Salah satu cara pemerintah daerah membantu UMKM meningkatkan kualitas dan produktivitas bisnisnya adalah dengan

memberikan pelatihan atau workshop. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM dalam bidang manajemen, pemasaran, produksi, dan teknologi. Selain itu juga pemberian izin usaha bagi pelaku UMKM sektor makanan dan minuman. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelaku UMKM dalam hal pemberian izin usaha. Pelaku UMKM harus memiliki izin usaha agar dapat memulai usaha di wilayah tersebut. Prosedur pemberian izin usaha yang mudah dan efektif akan membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas bisnisnya.

Menghadapi era digitalisasi, pemerintah Indonesia sangat focus pada peningkatan digitalisasi bagi pengembangan pelaku usaha UMKM, Pemerintah daerah dapat memberikan pembiayaan teknologi kepada pelaku UMKM. Pembiayaan teknologi ini dapat digunakan untuk membeli peralatan atau mesin yang lebih modern dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.

Pemerintah daerah dapat membantu pelaku UMKM untuk memperluas akses ke pasar dengan cara mempromosikan dan memasarkan produk-produknya. Misalnya dengan membuka gerai atau outlet pemasaran di tempat-tempat strategis dan memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengikuti pameran atau bazar.

Pemerintah juga harus mendorong kolaborasi antar pelaku UMKM: Pemerintah daerah dapat mendorong kolaborasi antara pelaku UMKM dengan memberikan tempat atau forum untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Kolaborasi dapat membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan produk atau memasuki pasar baru.

Dengan adanya fasilitasi dari pemerintah daerah, diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas bisnisnya sehingga dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, ini juga akan berdampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional secara keseluruhan.

Keterampilan dan cara pelaku usaha UMKM dalam memasarkan produk juga merupakan salah satu poin dalam kebijakan pemerintah untuk pelaku usaha UMKM sektor makanan dan minuman. Pemerintah daerah memfasilitasi UMKM dalam hal memasarkan produknya, melalui berbagai pelatihan dan promosi pemasaran. Selain itu, dipromosikan juga melalui internet yang memberikan akses global pada produk lokal. Pemerintah daerah memberikan bantuan pelatihan pada UMKM dalam berbagai bidang, seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan pengelolaan

keuangan, pemasaran, dan manajemen bisnis. Pemerintah daerah bisa memberikan bantuan melalui bantuan permodalan dengan skema subsidi bunga atau membantu memasarkan produk melalui program kerjasama dengan pihak swasta atau mitra strategi bisnis lain.

Kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan UMKM Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kemajuan bagi UMKM sehingga mereka bisa terus berkembang dan menjadi sumber ekonomi yang baik. Semakin banyak usaha UMKM, akan semakin meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka pengangguran. UMKM juga mengeksplorasi sumber daya lokal serta mendukung lingkungan yang berkelanjutan sebagai salah satu dari dasar pilar ekonomi nasional.

Upaya Pemerintah Kota Kudus untuk memberikan dukungan secara syariah dalam pengembangan UMKM sektor makanan dan minuman dengan memastikan kehalalan produk adalah tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah. Pemerintah Kota Kudus dapat mengembangkan atau memfasilitasi program sertifikasi halal untuk produk UMKM sektor makanan dan minuman. Ini akan membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk halal dari UMKM setempat. Memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM mengenai persyaratan dan prosedur sertifikasi halal. Ini termasuk proses pemilihan bahan baku halal, pengolahan produk yang sesuai dengan aturan halal, dan pemahaman tentang label halal.

Kebijakan pemerintah Kota Kudus melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi untuk mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi. Hal ini juga membantu memastikan bahwa sertifikat halal yang dikeluarkan benar-benar sah dan dapat dipercaya. Mendukung pemasaran produk-produk UMKM sektor makanan dan minuman yang telah disertifikasi halal. Pemerintah dapat membantu dalam mempromosikan produk-produk ini baik secara lokal maupun nasional.

Pemerintah Kota Kudus juga memberikan dukungan dalam hal peningkatan kualitas produk UMKM. Produk halal seharusnya tidak hanya memenuhi persyaratan halal, tetapi juga harus bersaing dalam hal rasa, kualitas, dan kemasan. Mengembangkan regulasi dan standar yang jelas untuk memastikan kepatuhan UMKM sektor makanan dan minuman terhadap prinsip ekonomi syariah, termasuk dalam hal pembuatan produk halal. Memberikan akses lebih besar

kepada UMKM untuk sumber daya keuangan yang mendukung pengembangan produk halal, seperti pinjaman syariah.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota Kudus dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM sektor makanan dan minuman yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal dan mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

